

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya, informasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial (Meilliana & Zaini, 2013). Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang memperlihatkan dimensi yang luas yaitu dengan menunjukkan kualitas penduduk suatu wilayah (Latuconsina, 2017). Kualitas hidup yang ditunjukkan adalah angka harapan hidup tiap orang, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Modal kualitas manusia yang baik diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini dilakukan dengan meningkatkan pembangunan manusia yang kemudian indikator – indikatornya dapat dilihat dalam publikasi *United Nation of Development Programme* (UNDP) ¹.

Menurut BPS (2016), konsep pembangunan dianggap menjadi paling lengkap, sebab disertai dengan sintesa-sintesa dari pengembangan teori sebelumnya yang kemudian dikenal juga sebagai paradigma

¹ BPS Papua Barat : *Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat 2016*

pembangunan manusia (*human development paradigm*). *Human development paradigm* menjelaskan bahwa tujuan utama dalam pembangunan adalah memperluas pilihan – pilihan manusia, hal ini dilihat dari dua sisi (Badan Pusat Statistik, 2016). *Pertama*: pembentukan kemampuan manusia yang dilihat dari kesehatan, pengetahuan, dan keahlian yang meningkat. *Kedua*: Penggunaan kemampuan yang telah dimilikinya untuk bekerja, menikmati kehidupan, atau aktif dalam berbagai kegiatan budaya, ekonomi, sosial, dan politik. Konsep holistik dari paradigma pembangunan manusia memiliki empat komponen penting, diantaranya:

- a. Produktivitas. Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Hal ini menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari salah satu pembangunan manusia.
- b. Ekuitas. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan – kesempatan ini.
- c. Kestinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan ini harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Segala permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.

- d. Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan dengan masyarakat dan bukan tanpa mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses kehidupan mereka. Menurut Nurfitriani (2017), keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

2. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam pengukuran indeks pembangunan manusia terdapat tiga komponen yang digunakan sebagai komponen dasar perhitungannya, diantaranya sebagai berikut:

a. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dihitung dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dengan rumus:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan :
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah

b. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan dihitung dengan memasukkan angka harapan hidup saat lahir, dengan rumus:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH + AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$$

Keterangan :

I : Indeks
AHH : Angka Harapan Hidup

c. Dimensi Pengeluaran

Dimensi pengeluaran dihitung dengan memasukkan pengeluaran per kapita disesuaikan, dengan rumus:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

d. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga komponen pembentuknya dan dinyatakan dalam bentuk poin :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Indeks Pembangunan Manusia terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang digunakan, yaitu :

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dijelaskan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Astuti, 2018). Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro & Smith, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

b. Teori Pertumbuhan Klasik

Ekonom klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan (Nurfitriani, 2017). Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyebabkan pengurangan ketidakuntungan. Hal ini disebabkan setiap tambahan penduduk akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas kembali menjadi negatif menyebabkan kemakmuran masyarakat menurun dan tingkat perkembangan ekonomi menjadi sangat rendah. Kondisi ini disebut dengan kondisi tidak berkembang, pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup.

c. Teori Schumpeter

Schumpeter menjelaskan bahwa peranan penting dari inovator dan wiraswasta dalam pertumbuhan ekonomi. Selain mampu meningkatkan keuntungan, hal ini juga dapat menaikkan standar hidup masyarakat dan kedudukan dalam bermasyarakat.

Schumpeter juga menjelaskan perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dijelaskan bahwa pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan output masyarakat disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dari proses produksi tanpa adanya perubahan dari teknologi produksi itu sendiri, sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta (Arsyad, 1988). Dalam kondisi perekonomian apapun, inovasi (perbaikan teknologi) yang dilakukan akan mampu mencapai keuntungan, hal tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Menurut Arsyad (1988), pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta, dan secara keseluruhan sumber kemajuan ekonomi yang lebih penting adalah pembangunan ekonomi tersebut.

d. Pertumbuhan Neo-Klasik

Menurut Nurfitriani (2017) teori yang muncul pada tahun 1950-an ini merupakan analisis dari pandangan-pandangan para ahli

ekonomi klasik, yaitu Solow yang kemudian dikembangkan oleh Edmund Philips, Herry Johnson dan J.E. Meade. Solow dan Denison menyimpulkan bahwa faktor terpenting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan teknologi dan penambahan kemahiran juga kepakaran tenaga kerja.

e. Teori Pertumbuhan Baru : Pertumbuhan Endogen

Teori ini dikemukakan oleh Paul M Romer, ia menyatakan bahwa imbasan teknologi mungkin terdapat dalam proses industrialisasi. Perilaku aliran modal dari negara-negara berkembang memicu konsep pertumbuhan endogen atau dikenal sebagai teori pertumbuhan baru.

Teori pertumbuhan baru menjelaskan proses produksi bukan dari kekuatan yang berasal dari luar sistem dengan melihat pertumbuhan pendapatan nasional yang persisten. Teori pertumbuhan baru menekankan pada pentingnya tabungan dan investasi modal manusia guna mempercepat pertumbuhan. Menurut Todaro dan Smith (2003), potensi pengembalian yang tinggi dari negara berkembang berkurang dengan cepat disebabkan rendahnya investasi komplementer dalam sumber daya manusia (pendidikan), infrastruktur, atau riset dan pengembangan. Teori pertumbuhan baru menjelaskan hasil endogen dari investasi negara dalam sumber daya

manusia dan industri padat pengetahuan dan teknologi (Nurfitriani, 2017).

4. Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto adalah salah satu indikator penting guna mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada periode tertentu baik atas harga berlaku maupun dalam harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Bank Indonesia, 2018).

Struktur perekonomian suatu daerah baik propinsi ataupun kabupaten akan mempengaruhi barang dan jasa akhir yang dihasilkan. Semakin tingginya nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan, semakin tinggi juga perolehan PDRB-nya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB akan memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional (Basuki & Prawoto, 2015).

Menurut Bank Indonesia (2018), PDRB secara konseptual dibedakan melalui tiga pendekatan :

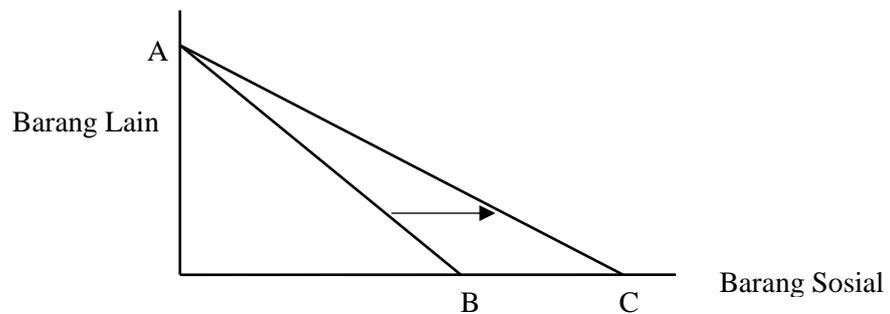
- a. Pendekatan Produksi (*production approach*), yaitu jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah tertentu yang berlangsung dalam periode tertentu.

- b. Pendekatan Pengeluaran (*expenditure approach*), yaitu komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba; konsumsi pemerintah; pembentukan modal tetap domestik bruto; perubahan inventori; dan ekspor neto.
- c. Pendekatan Pendapatan (*income approach*), yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Pembangunan manusia erat kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi kinerja ekonomi melalui kapasitas penduduk, konsekuensinya akan terjadinya peningkatan produktivitas (Yosepa, 2018). Semakin tingginya produktivitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi akan mengubah pola konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Daya beli masyarakat berkaitan dengan IPM, adalah sebagai salah satu komponen pembentuk IPM yaitu indikator pendapatan (Todaro, 2003).

5. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan menstabilkan harga, tingkat output, dan juga kesempatan kerja dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Basuki & Saptutyingsih, 2016). Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2015).



Sumber : Sukirno (2000) dalam Basuki & Saptutyingsih (2016)

Gambar 2.1

Perubahan Garis Anggaran Akibat Adanya Pengeluaran

Pada gambar 2.1 diatas, menjelaskan kenaikan pengeluaran pemerintah untuk sosial, misalnya biaya untuk meringankan biaya sekolah membuat garis biaya bergeser ke kanan yaitu ke garis AC. Demikian, dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperluas pilihan bagi manusia. Dalam hal ini kaitannya adalah semakin besar Pengeluaran Pemerintah akan memberi peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut Dumairy (1999) dalam Budiyanto (2017) ada empat peran yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu :

- a. Peran Alokatif, adalah peran dari pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya dapat dioptimalkan dan mendukung tercapainya efisiensi ekonomi.
- b. Peran Distributif, adalah peran pemerintah guna mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil.
- c. Peran Stabilitatif, adalah peran pemerintah guna memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkan kembali saat terjadi kondisi ekonomi yang disequilibrium.
- d. Peran Dinamisatif, adalah peran pemerintah guna menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar tumbuh dengan lebih cepat, berkembang, dan maju.

Pasca diberlakukannya desentralisasi di Indonesia, mengakibatkan adanya otonomi yang cukup luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerahnya sesuai dengan kapasitas dan prioritas daerah tersebut (Rustan, 2013). Pada otonomi daerah diperlukan sebuah desentralisasi fiskal yang akan digunakan dalam merumuskan kebijakan guna memacu pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tiebout (1956) dalam Rustan (2013) terdapat dua gagasan mendasar dalam ekonomi dibalik adanya desentralisasi fiskal yaitu, (1) melalui desentralisasi efisiensi ekonomi dapat ditingkatkan, yaitu pemerintah daerah sanggup untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan (2) persaingan dalam penyediaan pelayanan publik dan mobilitas

penduduk antar pemerintah daerah akan terjadi dalam rangka menyesuaikan preferensi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Pada tingkat pemerintahan provinsi terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu hasil dari dana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pengeluaran atau belanja yang meliputi belanja operasi dan belanja modal². Sedangkan APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan untuk pengeluaran belanja seperti bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan dan bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, selain dari pada itu pada pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN, Pemerintah Pusat atau Kepala Daerah Otonom lainnya (Prasetya, 2012).

Belanja atau pengeluaran dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan kemampuan pendapatannya serta didukung oleh pembiayaan yang sehat. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pendapatan yang merata, serta tercapainya pembangunan di segala sektor (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan , 2016).

Menurut Saidah (2011), guna mempermudah dilakukannya evaluasi terhadap penggunaan belanja atau pengeluaran, sejak tahun 2007 sistem

² Ferry Prasetya, dikutip dalam *Bagian V (Teori Pengeluaran Pemerintah) : Modul Ekonomi Publik* (Malang, Universitas Brawijaya, 2012) bagian III.

penganggaran mulai dilakukan perincian dengan lebih jelas menurut fungsi atau sektornya. Fungsi atau sektor tersebut terdiri dari :

- 1) Fungsi Pelayanan Umum, yaitu ditujukan untuk peningkatan pelayanan umum masyarakat terhadap rakyat maupun pihak swasta.
- 2) Fungsi Ekonomi, yaitu ditujukan untuk agar memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga terdapat *multiplier effect* yang besar.
- 3) Fungsi Kesehatan, yakni ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan. Hal ini termasuk pembelian obat, fasilitas kesehatan (seperti halnya alat medis maupun penunjang lainnya), dan gedung kesehatan.
- 4) Fungsi Pendidikan, yakni ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan seperti pembelian buku, penambahan fasilitas jaringan komunikasi, dan hingga pada penyediaan gedung sekolah.
- 5) Fungsi Ketertiban dan Keamanan, ditujukan pada penambahan kekuatan dan ketahanan yang mendukung ketahanan dan keamanan suatu tertentu.
- 6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, yaitu ditujukan dalam rangka membiayai penyelenggaraan penyediaan perumahan dan fasilitas umum.
- 7) Fungsi Pariwisata dan Lingkungan Hidup, adalah ditujukan untuk membiayai fasilitas hiburan bagi masyarakat seperti halnya

periklanan atau promosi dan pemeliharaan tempat wisata atau peningkatan kelestarian lingkungan hidup.

- 8) Fungsi Perlindungan atau Jaminan Sosial, yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai jaminan perlindungan masyarakat.

6. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang di suatu negara tidak hanya mengukur kenaikan produksi barang dan jasa, melainkan juga berdasarkan perubahan lain yang berlaku dalam beberapa aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, hal ini disebut dengan pembangunan ekonomi (Sukirno, 2015).

Pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi terhadap pembangunan manusia, dengan melalui aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga dan pemerintah serta peranan dari masyarakat sipil (*civil society*) yang dimunculkan dengan keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (Brata, 2002). Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) dengan pembangunan manusia (*Human Development*) menunjukkan hubungannya dalam

penyediaan sumber daya untuk mencapai keberlanjutan dari pembangunan manusia (Ramirez, Ranis, & Stewart, 1998).

b. Hubungan Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai cerminan dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam wilayah tersebut, guna membiayai sektor-sektor publik yang penting dan sebagai penunjang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya, dijadikan pemerintah sebagai prioritas dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM (Badan Pusat Statistik, 2017).

Pencerminan dalam IPM ini dimaksudkan adalah investasi pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan, dan kemudian akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Rahmat & Nasir, 2016). Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian pembangunan sosioekonomi suatu negara. Kesehatan, pendidikan, dan keterampilan merupakan komponen modal manusia (*human capital*) pada investasi produktif dalam sumber daya manusia yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Todaro & Smith, 2011).

Menurut Budiyanto (2017), kesehatan merupakan sebuah dasar dari upaya peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan

kapasitas dalam proses belajar dan mengajar pada tingkat individu maupun keluarga. Kondisi tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dibanding tenaga kerja yang kurang sehat. Kemudian, anak yang sehat akan memiliki kemampuan belajar dan menyerap pelajaran dengan baik dan memiliki kecenderungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dibanding dengan keluarga yang tidak sehat. Pada tingkat makro, penduduk dengan kesehatan yang baik sebagai salah satu input dalam rangka menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Budiyanto, 2017).

c. Hubungan Pengeluaran Pemerintah bidang Fasilitas Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia

Sektor-sektor publik dianggap penting dan dibiayai oleh pemerintah karena dijadikan sebagai prioritas dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM (Badan Pusat Statistik, 2017). Pembangunan Manusia dapat tercermin dari pembangunan berbagai macam sarana prasarana dan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat dari aspek pendidikan maupun kesehatan, juga kebutuhan akan ketersediaan perumahan yang layak.

Peningkatan fasilitas umum berakibat pada biaya ekonomi yang murah, yang berarti telah terjadi peningkatan skala ekonomi dan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (Basuki & Saptutyingsih, 2016). Menurut Hidayat (2018) meningkatkan skala infrastruktur akan mampu menaikkan kualitas kesehatan dan pendidikan, yang kaitannya dengan distribusi barang maupun jasa penunjang kesehatan dan pendidikan. Sehingga, akan meningkatkan pembangunan manusia dalam skala daerah otonom dan nasional.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian tersebut berasal dari para peneliti baik peneliti dalam negeri maupun luar negeri.

Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Penelitian-penelitian ini berikutnya menjadi bahan peneliti dalam membahas permasalahan mengenai indeks pembangunan manusia yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Menurut Nurfitriani (2017), dalam penelitian yang dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu tahun 2010 sampai 2014, memaparkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel Indeks Pemberdayaan Gender dan Infrastruktur terhadap

Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tersebut. Kemudian, variabel belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif signifikan, hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan alokasi dana dan maraknya kasus korupsi, sedangkan variabel belanja pemerintah di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini disebabkan oleh alokasi dana yang dilakukan adalah untuk pembangunan fisik, sedangkan Provinsi Bengkulu merupakan daerah rawan bencana.

Rahmat dan Bachtiar (2016), dalam penelitian yang dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil estimasi regresi dengan metode *Fixed Effect*, antara variabel belanja sektor pendidikan dan belanja sektor kesehatan, serta kemiskinan terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. Kemudian, pada variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tersebut.

Menurut Budiyanto (2017), dalam penelitian yang dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di kawasan Afrika Sub-Sahara tahun 2010 – 2014 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara terpilih. Begitu juga dengan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Namun, untuk variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hidayat (2018), dalam penelitian yang dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh tahun 2012 – 2016, menunjukkan bahwa variabel PDRB, fasilitas umum, dan belanja pemerintah di bidang pendidikan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh tahun 2012 - 2016.

Menurut Yosepa (2018), dalam penelitian yang dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dari tahun 2010 – 2016, menunjukkan bahwa antara variabel PDRB, PMA, PMDN, dan pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode tahun 2010-2016.

Menurut Asmita, dkk (2017) dalam penelitian yang dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 – 2013 yang mencakup 33 kabupaten/kota, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. Sedangkan untuk variabel jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian untuk variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki hasil yang berbeda dengan beberapa hasil

penelitian lainnya diatas, adalah bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. Namun, berbeda dengan variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang tidak memiliki pengaruh terhadap IPM provinsi tersebut, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Provinsi Sumatera Utara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tersebut.

Shah (2016), dalam penelitiannya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kawasan Eropa, Asia Tengah, Amerika Latin, Karibia, Asia Selatan, dan Afrika Sub-Sahara menunjukkan bahwa variabel PDB per kapita, tingkat melek huruf, harapan hidup saat lahir, indeks Gini, tingkat fertilitas, dan emisi Co2 berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam analisis bijak wilayah yang dilakukan oleh peneliti, dapat diamati bahwa kawasan Eropa, Asia Tengah, Amerika Latin, dan Karibia memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi dibandingkan dengan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih rendah.

Singariya (2014), dalam penelitian yang dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara India dalam aspek sosioekonomi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang kuat antara variabel pendapatan per kapita dalam harga konstan, pengeluaran konsumsi per kapita bulanan, tingkat melek huruf, fasilitas telepon dan listrik terhadap Indeks Pembangunan Manusia di negara tersebut. Sedangkan untuk variabel

pertumbuhan penduduk, jumlah pernikahan dibawah usia delapan belas tahun, dan tingkat partisipasi kerja perempuan memiliki pengaruh yang negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di India.

Menurut Arisman (2018) dalam penelitian yang dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada negara anggota ASEAN, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan *random effect model*, variabel jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia pada negara anggota ASEAN. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memengaruhi indeks pembangunan manusia. Penelitian ini berimplikasi pentingnya pemerintah melakukan pengendalian jumlah penduduk dan akselerasi pertumbuhan ekonominya.

Çağlayan-Akay & Van (2017), dalam penelitian yang dilakukan terhadap Indeks Pembangunan di 130 negara periode tahun 2009 sampai 2014 menunjukkan bahwa dari hasil yang diperoleh dari model probit Bayesian, dapat diamati bahwa terdapat pengaruh positif antara sebagian variabel populasi pedesaan, pengeluaran kesehatan, produk domestik bruto (PDB), pengguna internet, harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah memiliki pengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia dalam jangka pendek. Sedangkan untuk sebagian lainnya variabel dari pengeluaran kesehatan, PDB, pengguna internet, harapan lama sekolah terdapat pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di 130 negara. Tetapi untuk sebagian lainnya dari variabel populasi pedesaan dan

harapan hidup saat lahir memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia dalam jangka panjang perkembangan manusia dalam jangka panjang.

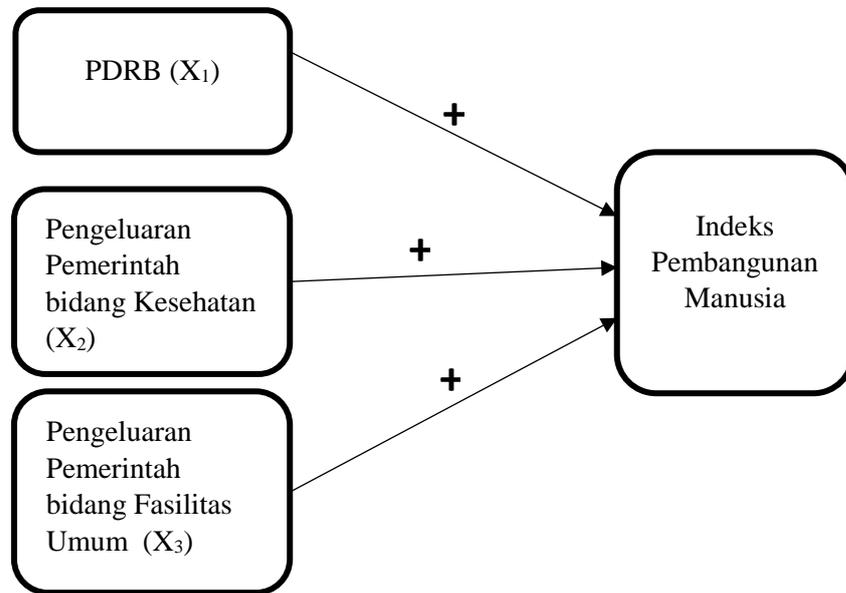
C. Hipotesis

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel PDRB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat tahun 2013-2017.
2. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2013-2017.
3. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah bidang Fasilitas Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2013-2017.

D. Kerangka Penelitian

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan model penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur pikir dalam melihat pengaruh variabel penentu Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya, informasi mengenai model penelitian dapat dilihat pada berikut:



Gambar 2.2.

Skema Kerangka Penelitian

Dari gambar di atas, penulis ingin mengkaji apakah PDRB, Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah bidang Fasilitas Umum, berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk pengujian ini akan digunakan analisis data panel.